

ABSTRAK

Elsa Nur Nisa. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah.

Kondisi alam Indonesia tidak hanya menyimpan potensi kekayaan yang melimpah tetapi juga terdapat potensi bencana yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kabupaten Bandung berada di urutan nomor empat daerah rawan bencana se-Indonesia. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada pasal 9 disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dan Pasal 30 menyebutkan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi: prabencana; saat tanggap darurat; dan pascabencana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. 2) Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung. 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung.

Penelitian ini diangkat dari tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari segala ancaman, diantaranya dari bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana juga sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah, teori tanggung jawab negara dalam Islam dan tujuan negara dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan sumber data berupa data primer dan sekunder, serta menggunakan teknik penelusuran informasi berupa: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana termasuk dalam kategori implementasi yang tidak berhasil (*Unsuccessful implementation*) karena ditemukan beberapa hal yang belum optimal baik dalam tahap prabencana, saat tanggap darurat maupun pascabencana. 2) Kendala dalam implementasi diantaranya: kelembagaan, koordinasi, komunikasi, anggaran dan sumber daya manusia. 3) Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah, penanggulangan bencana mencerminkan *Maqasid Asy-Syariah* karena tujuannya secara umum antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta-bendanya dari (ancaman bencana), dan penanggulangan bencana sejalan dengan konsep Jaminan Sosial dan prinsip Siyasah Dustruriyah.